

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang seharusnya mendapatkan manfaat dari program literasi Ultra Mikro (UMi) AMBO justru menghadapi kenyataan pahit dalam mengakses pembiayaan berbasis keuangan hijau. Program yang digagas untuk memberdayakan UMKM syariah dan memberantas rentenir, dalam realisasinya, menunjukkan ketimpangan yang mencolok antara harapan dan kenyataan. Selama Periode 2017-2024 telah menyalurkan Rp207,4 miliar kepada 43.262 penerima di Kota Padang. Namun, rata-rata penerima hanya mendapatkan Rp4,5 juta, jauh di bawah plafon maksimal Rp20 juta yang dijanjikan. Di sisi lain, Kota Padang hanya menyerap 16,17% penerima dan 16,12% dana, sementara 83,83% penerima dan 83,88% dana disalurkan di luar Kota Padang(Data.umi.id). Fakta ini menunjukkan ketimpangan distribusi pembiayaan di wilayah yang seharusnya menjadi pusat ekonomi dan percontohan keuangan syariah. Ironisnya, program yang bertujuan mempercepat inklusi keuangan syariah UMi AMBO belum sepenuhnya mengadopsi prinsip *green finance* yang berbasis keberlanjutan. Padahal, integrasi keuangan syariah dengan konsep *green finance* dapat mendorong pembiayaan yang tidak hanya adil, tetapi juga ramah lingkungan. Misalnya, pembiayaan berbasis energi terbarukan atau usaha mikro ramah lingkungan dapat menjadi prioritas. Sayangnya, sulitnya akses pembiayaan ini justru membuat pelaku usaha kecil mencari solusi instan melalui rentenir, bertolak belakang dengan semangat keberlanjutan yang diusung.

Selain itu, meskipun program Ultra Mikro AMBO telah diluncurkan dengan tujuan mulia untuk memberantas rentenir dan memperbaiki akses keuangan, kenyataannya banyak pelaku UMKM yang masih merasa

terpinggirkan. Ketika prosedur yang rumit dan tidak jelas semakin menambah kesulitan, mereka terpaksa bergantung pada praktik-praktik informal yang justru memperburuk keadaan. Dalam prakteknya, skema pembiayaan yang dihadirkan tidak hanya terhambat oleh prosedur yang berbelit-belit, tetapi juga dibingungkan dengan syarat-syarat yang tidak transparan dan kurangnya penyuluhan yang memadai. Hal ini menciptakan ketidakpastian dan kekhawatiran di kalangan calon penerima, yang pada akhirnya menghambat akses mereka terhadap fasilitas pembiayaan yang sebenarnya ditujukan untuk mempercepat pemberdayaan ekonomi.

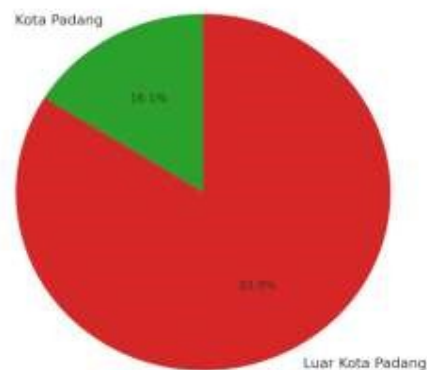
Program Ultra Mikro AMBO berpotensi gagal mencapai tujuannya jika tidak ada perubahan signifikan dalam pengelolaan dan pengawasan distribusi pembiayaan, serta upaya nyata untuk memastikan bahwa prinsip *green finance* dapat diterapkan dengan baik untuk mendukung usaha yang berkelanjutan. Sementara itu, semakin kompleksnya prosedur, ditambah dengan ketidaksesuaian antara tujuan dan realisasi, dapat menyebabkan pelaku UMKM semakin terisolasi dari solusi keuangan yang lebih baik, sehingga memunculkan kerentanan yang lebih besar terhadap praktik keuangan yang tidak sehat seperti rentenir.

Grafik 2 Survei Program Pembiayaan Mikro 2017-2014

Distribusi Penerima Pembiayaan (2017-2024)



Distribusi Dana Penyalur (2017-2024)



(Sumber Data: Satu Data PIP, 2024)

Gambar di atas memperlihatkan dua grafik yang menggambarkan ketimpangan dalam distribusi penerima dan penyaluran pembiayaan program literasi UMi AMBO di Padang selama periode 2017-2024. Pada grafik pertama, yang menunjukkan distribusi penerima pembiayaan, terlihat bahwa hanya 16,17% dari total penerima yang berada di Kota Padang, sementara 83,83% sisanya berada di luar Kota Padang. Hal ini mencerminkan kesenjangan yang mencolok antara pusat ekonomi Sumatera Barat dan daerah-daerah lainnya dalam hal akses ke pembiayaan. Pada grafik kedua, yang menggambarkan distribusi dana penyalur, Kota Padang hanya mendapatkan 16,12% dari total dana yang disalurkan, sementara 83,88% dana dialokasikan ke wilayah luar Kota Padang. Meskipun Kota Padang adalah pusat ekonomi utama, sebagian besar dana tidak tersalurkan secara proporsional ke Kota Padang. Kedua grafik ini menggambarkan ketidakmerataan akses pembiayaan, yang mengindikasikan adanya ketimpangan dalam distribusi dana dan penerima pembiayaan.

Namun, meskipun UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, sekitar 70% dari mereka masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal (Bank Indonesia, 2020). Ini menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu segera diatasi melalui program-program pemerintah seperti Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Dengan plafon maksimal Rp20 juta per orang (Kemenkeu), program UMi berhasil memperluas akses pembiayaan, termasuk di wilayah Sumatera Barat, yang memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM berbasis lokal dan berkelanjutan (Kemenkeu, 2024).

Lebih jauh lagi, program UMi AMBO yang berfokus pada pembiayaan hijau tidak hanya meningkatkan akses modal bagi UMKM, tetapi juga mendorong praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan (Khairunisa, 2023). Program-program UMi AMBO sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, yang mencakup pengurangan emisi karbon dan pelestarian lingkungan. Dengan demikian, penguatan literasi keuangan dan akses

pembiayaan melalui program UMi juga memberikan manfaat lingkungan dan sosial yang lebih luas, yang penting bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Untuk mendorong keberlanjutan sektor UMKM, pemerintah dan lembaga keuangan harus meningkatkan kolaborasi dalam mengembangkan produk keuangan yang lebih inklusif dan ramah lingkungan. Upaya ini akan membantu mengatasi tantangan literasi keuangan sekaligus memberikan akses ke modal yang dibutuhkan bagi UMKM, terutama yang berorientasi pada keberlanjutan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2021-2023), jumlah penduduk miskin mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2021, terdapat 370,67 ribu penduduk yang tergolong miskin, sementara pada tahun 2022 jumlahnya menurun menjadi 335,21 ribu jiwa. Namun, pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin kembali meningkat menjadi 340,37 ribu jiwa. Di Provinsi Sumatera Barat, terdapat tantangan dalam mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Hal ini menciptakan trade-off yang membutuhkan solusi praktis, seperti peningkatan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan dan penerapan investasi berbasis pembiayaan hijau (Oktafiana et al., 2021).

Pembiayaan hijau dianggap sebagai solusi yang mendukung lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan (Khan et al., 2022). Semakin meningkatnya kesadaran global terhadap isu lingkungan, perubahan iklim, serta komitmen pada tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dari PBB untuk dicapai pada tahun 2030, telah menarik perhatian pada pembiayaan hijau (Rutkowska & Kamińska, 2020). Seiring meningkatnya kesadaran global terhadap isu lingkungan, *green finance* menjadi instrumen yang semakin penting dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Investasi dalam *green finance* tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mengutamakan dampak sosial dan lingkungan yang positif, seperti pengurangan emisi karbon dan pelestarian sumber daya alam. Hal ini sesuai dengan tujuan SDGs, yang menekankan pentingnya kerjasama global untuk

mencapai ketahanan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan(Yuliana, 2015).

Di Indonesia, perhatian terhadap *green finance* terus meningkat melalui berbagai program pembiayaan mikro dan ultra mikro yang ramah lingkungan, seperti program UMi (Ultra Mikro). Program ini bertujuan untuk memberikan akses keuangan bagi masyarakat rentan, termasuk di Sumatra Barat, sambil mendorong praktik bisnis yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan (Rudiyanto, 2022). Namun, tantangan yang dihadapi meliputi peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

Semakin banyak pihak mulai yakin kalau mekanisme keuangan dan pembiayaan mikro merupakan strategi penting dalam penanggulangan kemiskinan. Buktinya adalah pemerintah pusat maupun daerah, begitu pula lembaga swasta ramai-ramai menyalurkan dana bergulir kepada kelompok masyarakat melalui lembaga keuangan dan pembiayaan mikro(Jenita, 2017). Meski begitu tetap ada kekhawatiran soal nasib lembaga keuangan yang belum jelas secara hukum(Soemena, 2022). Secara paradoksial, pemerintah memberikan dana bergulir yang mendukung keuangan dan pembiayaan mikro, tetapi ada juga undang-undang yang memperlambat perkembangan lembaga keuangan mikro(Riyadi & Akhmadi, 2022).

Sejauh ini kajian yang ada kurang merespon aspek krusial dari akses pembiayaan berbasis *green finance* Studi melalui program UMi AMBO di Padang. Literasi keuangan, faktor demografi dan akses pembiayaan pengaruhnya terhadap keputusan pengambilan kredit usaha sektor informal(Darmawan & Fatiharani, 2019). Darmawan, menegaskan bahwa kemampuan dalam literasi keuangan, faktor demografi, dan ketersediaan pembiayaan memainkan peran signifikan dalam keputusan pengambilan kredit usaha di sektor informal. Hasil studi menunjukkan bahwa individu yang memiliki pemahaman yang baik tentang literasi keuangan cenderung membuat keputusan yang lebih tepat dalam mengelola kredit usaha mereka. Selain itu,

karakteristik demografis seperti usia dan tingkat pendidikan juga memiliki dampak yang kuat, dengan orang yang lebih muda dan berpendidikan lebih tinggi cenderung lebih berani dalam mengambil risiko dengan mengajukan kredit usaha. Selain itu, ketersediaan akses ke pembiayaan juga merupakan faktor krusial, di mana mereka yang memiliki akses yang lebih mudah ke sumber pembiayaan lebih mungkin untuk memanfaatkannya untuk pertumbuhan usaha mereka. Implikasi dari penemuan ini menyoroti pentingnya meningkatkan literasi keuangan, mendukung kelompok rentan, dan memperluas akses ke Pembiayaan bagi para pelaku usaha informal untuk mendorong perkembangan ekonomi di tingkat dasar. Kedua, Studi yang cenderung memetakan *Akses Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah ke Perbankan*(Rudiyanto, 2022). Rudiyanto Mengatakan bahwa perbankan telah berperan penting dalam mengatasi masalah Pembiayaan yang dihadapi UMKM. Meskipun demikian, hasil menunjukkan bahwa hanya 40% UMKM yang memilih perbankan sebagai sumber potensial untuk pengembangan. Pelaku UMKM mengharapkan bantuan finansial dan pelatihan teknis dari perbankan untuk mendukung pertumbuhan usaha mereka. Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh (Yuan et al., 2024) *Green Financial Policy, Resource Allocation and Corporate Environmental Responsibility*. Temuan di atas mengindikasikan bahwa institusi formal kebijakan pembiayaan hijau yang dipimpin oleh pemerintah dapat memengaruhi secara positif tanggung jawab lingkungan perusahaan, dengan faktor pengembangan hijau regional dan penegakan hukum yang meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut. Selain itu, tingkat polusi lokal semakin memperkuat sensitifitas perusahaan terhadap efek kebijakan ini. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan mengenai peran penting kebijakan pembiayaan hijau dalam memajukan ekonomi berkelanjutan, dan membantu menyelaraskan bukti-bukti yang beragam mengenai fungsi finansial dari kebijakan pembiayaan hijau pada tingkat perusahaan.

Dari tiga kecenderungan tersebut, bahwa akses pembiayaan berbasis *green finance* studi terhadap program UMi Ambo di Padang, Provinsi Sumatera Barat. Model pengembangan lembaga keuangan mikro berbasis *green finance* adalah prinsip kegiatan pada lembaga keuangan yang mengacu pada aspek *sustainability* pada setiap kegiatan bisnis yang dilakukan. *Green finance* berbasis masyarakat merupakan konsep yang mencakup penggunaan prinsip-prinsip keuangan yang ramah lingkungan dan mengacu pada keadilan sosial, terutama dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan ekonomi berkelanjutan (Yuliawati et al., 2022). Dari segi kesejahteraan masyarakat masih rentan dengan kemiskinan, meskipun selamanya tidak selalu relevan. Oleh karena itu, munculah sebuah solusi untuk memberantas kemiskinan dalam bentuk akses pembiayaan berbasis *green finance* dengan adanya peluang pertumbuhan ekonomi tersebut, diharapkan lembaga jasa keuangan dapat menciptakan model akses pembiayaan yang tidak hanya mencari profit tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. (Bayu, 2021).

Tujuan tulisan ini adalah untuk menganalisis akses pembiayaan berbasis *green finance* studi pada program UMi AMBO di Padang. Dan memberikan pemahaman mendalam sebagai dasar perumusan kebijakan dan akses pembiayaan berbasis *green finance* di Padang. Studi ini didasarkan pada suatu argumen bahwa dalam menanggapi kebutuhan untuk melengkapi kekurangan dari studi sebelumnya yang kurang mendalam, fokus tulisan ini adalah menjawab tiga pertanyaan yang dirumuskan. Pertama, akan diselidiki sejauh mana akses pembiayaan berbasis *green finance* terhadap program UMi AMBO di Padang. Kedua, peneliti akan mengulas implementasi Pembiayaan berbasis *green finance* dalam studi kasus program UMi AMBO di Padang. Ketiga, menjelaskan tingkat efektivitas berbasis *green finance* pada program UMi AMBO di Padang. Jawaban atas ketiga pertanyaan ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang keberhasilan dan tantangan dari

implementasi program, serta memberikan landasan yang kokoh bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dan inklusif dalam mendukung akses pembiayaan berbasis *green finance* di Padang. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperluas pemahaman dan mengoptimalkan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Padang Provinsi Sumatera Barat. Agar penelitian lebih terarah pada sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat, maka penulis memfokuskan pembahasan penelitian pada “**Akses Pembiayaan Berbasis *Green Finance* Studi Kasus Pada Program UMi AMBO di Padang**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka untuk lebih sistematis dan terarahnya penelitian ini, penulis akan merumuskan permasalahan ini yaitu: Bagaimana Akses Pembiayaan Berbasis *Green Finance* Studi Pada Program UMi AMBO di Padang.

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Bagaimana akses pembiayaan berbasis *green finance* studi terhadap program UMi AMBO di Padang?
- 1.3.2 Bagaimana implementasi pembiayaan berbasis *green finance* terhadap studi program UMi AMBO di Padang?
- 1.3.3 Bagaimana efektivitas pembiayaan berbasis *green finance* terhadap studi program UMi AMBO di Padang?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk menganalisis akses pembiayaan berbasis *green finance* studi kasus pada program UMi AMBO di Padang.
- 1.4.2 Untuk menganalisis implementasi pembiayaan berbasis *green finance* terhadap studi program UMi AMBO di Padang.
- 1.4.3 Untuk menganalisis efektivitas pembiayaan berbasis *green finance* terhadap program UMi AMBO di Padang.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Kegunaan teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan menjadi suatu karya ilmiah yang menambah ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai informasi kepada pembaca tentang akses pembiayaan berbasis *green finance* studi terhadap program UMi AMBO di Padang.

1.5.2 Kegunaan praktis

Kegunaan praktis penelitian ini diharapkan mampu mengasah kemampuan analisis peneliti dan menambah cakrawala ilmu pengetahuan bagi pembaca. dan juga sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan program magister (S2) pada program studi Ekonomi Syari'ah

